BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Politik

Sebenarnya politik punya arti yang beragam yaitu dalam perkembangannya yang semakin meluas yang tidak mengandung makna tunggal. Secara etimologi, kata politik perasal dari bahasa Yunani yaitu “Politeia”, yang akar katanya yaitu “Polis” dan “Taiia”. Polis itu sendiri berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (Negara),[[1]](#footnote-2) atau lansung di artikan sebagai “Kota”[[2]](#footnote-3) [[3]](#footnote-4) sementara kata “taiia” berarti urusan. Politik jika dilihat dari kepentingannya, maka politik mempunyai dua (2) arti yang di teijemahkan dari bahasa Inggris yaitu “Politics” dan “Policy”.

Plitik dalam arti “politics" mempunyai makna kepentingan umum pada warga suatu Negara. Pengertian ini memiliki beberpa cakupan yaitu sebagai berikut:

* Suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, dan cara serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.
* Suatu keadaan yang dikehendaki, disertai dengan jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

> Suatu keadaan yang dikehendaki, disertai dengan jalan, cara dan alat yang digunakan untukk mencapai tujuan yang diinginkan atau medan dimana keseluruhan individu atau kelompok individu yang masing-masing bergerak unntuk mencapai kepentingannya dan indenya sendiri.

Menurut politikologi yang dirujuk oleh Corrie van Der Ven bahwa “politics" berarti kegiatan untuk memperoleh kekuasaan, pengaturan konflik yang juga mencapai kegiatan politik di luar lembaga formal[[4]](#footnote-5)

Kemudian pada pihak lain politik dalam pengertian “Policy” mempunyai makna suatu kebijaksajaan yang dirumuskkan berdasarkan pertimbangan yaitu pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan yang dikehendaki.[[5]](#footnote-6) Policy yang adalah kebijaksanaan sebagai dasar pengambilan segalah sesuatu keputusan dalam suatu partai, perusahaan, sekolah, lembaga, gereja, dan sebagainya.[[6]](#footnote-7) [[7]](#footnote-8)

Politik didefenisikan oleh ahli etika yaitu Aristoteles sebagai cabang pengetahuan praktis. Politik juga merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompoknya. Yang man manusia adalah mahkluk-mahkluk polis (Negara/kota). Kecenderungan alami manusia adalah membentuk kelompok, bertindak sebagai kelompok. Sasaran politik sama dengan tujuan etika dan sama dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya

untiik mencapai Eudaimonia, kesejahteraan yang sangat ppenting vital bagi setiap orang.

Kari Duetch memberikan pengertian yang lebih operasional bahwa politik itu baik menyangkut Negara dan pemerintah ataupun manusia sebagai pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat: ‘‘politics is the making of decision by public”}2 Di sini Deutch menunjukkan perspektif pilihan tersendiri yang menyangkut suatu bentuk dan mekanisme pengambilan keputusan yang mengarah kepada keputusan yang bersifat demokrasi. Pada pihak lain Pdt. E.G. Singgi memberikan defenisi tentang politik sebagai suatu seni. Secara lengkap ia mengatakan bahwa politik adalah seni yang bersangkut paut dengan proses pengambilan keputusan untuk orang-orang yang berbeda kepentingan, di mana pengambilan keputusan masa depan bangsa.[[8]](#footnote-9) [[9]](#footnote-10)

Pierre Bourdieu, memeberi definisi tentang politk sebagai suatu perjuangan demi gagasan-gagasan tetapi demi satu tipe gagasan yang memberi kekuatan dengan berperan sebagai kekuatan mobilisasi[[10]](#footnote-11). Mobilisasi itu bukanlah politik itu sendiri tetapi suatu pengusahaan yang memungkinkan suatu gagasan masuk ke dalam mekanisme politik untuk dapat terwujud.

Dalam perkembangannya, politik dikategorikan oleh beberapa ahli ke dalam dua bagian besar yaitu pada suatu pihak, politik sebagai suatu filsafat

(political philosophy). Kedua pengelompokan tersebut melahirkan pengertian yang berbeda khusunya pada objek dan persoalan-persoalan utamanya, namun keduanya berangkat dari teori tentang hubungan Negara dan seni pemerintahan sipil.

Lane W. Lancaster memberikan defenisi tentang politik sebagai ilmu, sesuai yang dikutip oleh Saut Siarit bahwa:

“political science generally Undertood to encompas the systematic study of state and it’s gofermment, political science is commonly distinguished from political philosophy as being concemd primarily with organizationof the state and its gofeming agencies, rather than with so- called fundamental nature” and its ideal “ands”. The terms “politics” which is some tames used as a synonym for political science, is now reserved by most students to describe “the activities” by which public officials are chosen and political policies promoted.” (“ilmu politik dipahami meliputi pekerjaan sistematis tentang Negara dan pemerintahannya, ilmu politiknya umumnya lebih terkemuka dari pada politik sebagai filsafat yang menjadi perhatian utama dengan oraganisasi Negara dan perwakilan pemerintahannya, agak lebih sehingga disebut “dasar alamia” dan bentuk yang ideal. Istila politik yang mana biasanya digunakan sebagai persamaan politik sekarang oleh banyak pelajar untuk menggambarkan aktivitas yang resmi dipilih pegawai dan promosi bagi para politisi”).[[11]](#footnote-12)

Hal serupa diberikan Ebenstein bahwa politik sebagai ilmu, dengan mendasarkan bahwa politik sebagai ilmu merupakan systematic analysis of go ferment, its processes, forms of organization institution and purposes.[[12]](#footnote-13) (analisis sistematis tentang pemerintahan, prosesnya, bentuk organisasi, institusi dan tujuannya.)

Di lain pihak, politik sebagai filsafat selain mengarah pada soal fundamental, hakikat dan tujuan local Negara juga membayangkan persoalan fungsi yang benar dari pemerintah dan batas-batas kekuasaannya yang tidak hanya pada individu, tetapi juga terhadap keluarga, lembaga-lembaga keagamaan dan institusi lainnya. Charles Willyam Handel mengatakan bahwa pertanyaan utama muncul di dalam filsafat politik adalah berkaitandengan alat control yang pas:

18

“what is the proper measure of control or regulation of the lives people by a government... it is therefore to draw out the true function of government and the limid of power...” (apa ukuran pengawasan atau aturan tentang kehidupan orang oleh suatu pemerintahan, itu sebabnya penting untuk menyatakan fungsi yang benar dari pemerintahan dan batas kekuasaan...”)[[13]](#footnote-14)

Haryantmoko menjelaskan bahwa ilmu politik berdasar pada pengamatan empiris sedangkan filsafat politik lebih mengarah pada suatu penafsiran hakikat poltik yang dari defenisisnya sendiri berfilsafat hipotesis. Tugas filsafat politik bukan mendeskripsikan fakta, tetapi membangun konsep-konsep yang membuat politik semakin dipahami secara lebih dalam. Ilmu politik memiliki ciri khas deskriptif, analisis dan penjelasan karena keinginan keilhamannya, ilmu politik ingin menjangkau ideal sebuah pengetahuan yang objektif dan menerapkan prinsip bebas nilai. Sedangkan filsafat politik lebih reflektif, sintesis dan menyeluruh sehingga menuntut pengambilan jarak untuk tetap kritis terhadap realitas politik. Filsafat politik selalu menentukan cara pandang tertentu dan

menuntut suatu penilaian. Filsafat politik memikirkan apa yang menjadi pra- andaian dalam debat-debat dan keputusan politik.[[14]](#footnote-15)

Terlepas dari pengertian secara umum di atas, T. B. Simatupang memberikan pandangan bahwa politik merangkum konseptualisasi dan implementasi perencanaan kerja.[[15]](#footnote-16) Lebih spesifik Gereja Toraja memberikan pandangan bahwa politik adalah penataan kehidupan bersama dalam masyarakat bangsa dan Negara.[[16]](#footnote-17) [[17]](#footnote-18)

Dari berbagai pengertian di atas, bila dirumuskan secara tegas bahwa politik pada satu pihak dipahami sebagai seni memerintah untuk mencapai tujuan tertentu yaitu tujuan mendirikan Negara. Namun di lain pihak politik dapat diartikan sebagai strategi kemauan bersama untuk membangun dan memelihara polis (kota-negara) sebagai tempat di mana kehidupan bersama dibina dan dipupuk. Jadi politik yang baik adalah politik yang pada penataan kehidupan bersama.

1. Politik Uang

Politik Uang dalam Bahasa Indonesia adalah suap, kemudian arti suap dalam Kamaus Besar Bahasa Indonesia ialah uang sogok.” Kemudian dalam

Kamus Politik Kontemporer, politik uang berarti pembagian uang kepada orang atau masyarakat pemilu yang di lakukan oleh calon atau tim sukses calon sehingga masyarakat yang diberi uang bersedia memilih atau mendukung calon yang bersangkutan.[[18]](#footnote-19)

Dalam buku komunikasi politik mengatakan bahwa sebenarnya politik uang adalah suatu kegiatan praktik suap yang kontraproduktif dengan demokrasi.[[19]](#footnote-20) Yang berarti bahwa praktik politik uang bertentangan dengan demokrasi yang sesungguhnya. Dengan demikian sebenarnya Prof. Hafied juga tidak setuju dengan politik uang karena suatu kegiatan yang berlawan dengan demokrasi.

Politik uang merupakan suatu pemicu teijadinya korupsi. Karena merupakan upaya penyalagunaan wewenang kenegaraan yang sebenarnya kepentingan bersama tetapi beralih menjadi kepentingan pribadi. Kemudian politik uang juga merupakan suatu pola pikir yang lahir pada masa kapitalisme, karena membuat orang berfikir bahwa suara mereka punya nilai sebagai komoditi politik yang bisa ditukarkan dengan uang sehingga simbolnya kedua pihak saling menguntungkan. Dan rupanya ada banyak orang yang dapat dipengaruhi oleh uang untuk mengubah pilihannya atau dengan kata lain melawan hati nirani. Dengan demikian dalam pemilu maupun pilkada bukan

lagi menjadi pesta demokrasi tetapi menjadi pasar transaksi untuk jual beli suara secara gelap.25

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa Money Politik (politik uang) sebenarnya suatu pemberian yang harus dibayar denga cara yang berbeda saling menguntungkan. Dengan memberikan imbalan untuk memperoleh hal yang lebih besar dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan. Politik uang sebenarnya suatu kegiatan yang sifatnya ambisi, karena dengan politik uang orang-orang kapitalisme dapat melakukan apa saja yang menjadi keinginanya, karena mereka memiliki modal yang cukup besar. Tetapi sebenarnya kegiatan ini merupakan persaingan yang tidak sehat dan boleh dikatakan suatu kegiatan yang sebenarnya jauh dari kebenaran bahkan melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

1. Praktek-Praktek Politik Uang

Jika berbicara mngenai praktek-praktek politik uang sebenarnya ada banyak hal yang kita jumpai di lingkungan ini yang sifatnya politik uang, yaitu sebagai berikut:

1. Uang, ini adala alat tukar yang sangat dibutuhkan setiap orang. Seiring dengan perkembangan zaman hidup, tanpa uang maka semua orang tidak memiliki uang, tidak bisa makan, minum dan lain sebagainya. Dengan demikian uang memiliki peranan penting dalam

kehidupan setiap orang. Inilah yang kemudian dipakai oleh para kaum kapitalis dalam menggunakan harta kekayaan untuk memicu orang lain supaya melakukan apa yang mereka inginkan26 karena uang merupakan suatu senjata yang ampuh dalam kelangsungan politik, maka para penjahat politk memakai hal ini sebagai suatu strategi untuk mencapi tujuan yang di inginkan,

1. Materi (fasilitas), bukan hanya uang yang menjadi senjata khusus bagi para calon wakil rakyat, tetapi salah satu hal yang tidak kalah penting yang juga mereka pakai dalam menjalankan misinya ialah dengan menjanjikan fasilitas-fasilitas khusus yang merupakan kebutuhan masyarakt tertentu untuk di peneuhi, misalnya: pengadaan pipa untuk air minum, perintisan jalan, pengadaan listrik, bahkan memasuki tempat-tempat tertentu dimana msyarakat berkumpul untuk melangsungkan ritual-ritual keagaamaan seperti gereja, masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya untuk menarik simpati kaum beragama dengan cara memberikan bantuan khusu kepada tempat ibadah tersebut seperti ikut dalam pembangunan secara khusus.
2. Faktor Yang Menyebabkan Politik Uang

Melihat politik uang yang sangat marak terjadi membuat orang berfikir bahwa tentu ada yang menyebakannya dan punya pengaruh khusus bagi masyarakat yang kurang baik.

Adapun factor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang ialah sebagai berikut.

a. Kemiskinan.

Melihat angka kemiskinan di Indonesia yang sangat tinggi rupanya punya mempengaruhi hati nurani masyarakat dalam menjalankan kebenaran. Ada banyak dampak dari kemiskinan tetapi bukan itu yang menjadi focus dalam tulisan ini. Tetapi kemiskinan sebnamya punya kaitan dengan maraknya politik uang yang terjadi di negeri ini. Jika Prof. Hafied berbicara bahwa, “banyak calon memanfaatkan kemniskinan sebagai peluang untuk mendapatkan kekuasaan dengan dalih-bukan untuk demokrasi melainkan menumpuk kekayaan melalui proyek APBN dan APBD sebagai rezeki tahunan.” Hal ini berarti bahwa memang kemiskinan adalah salah satu wadah yang dipakai para penjahat politik sebagai peluang untuk mendapatkan kekuasaan. Masyrakat miskin dengan mudah menerima bantuan tersebut karena dengan sulitanya masyarakat miskin untuk mendapat kebutuhan hidup sehari-harinya. Dan tanpa pikir panjang mereka tidak meikirkan dampaknya bagi merka sendiri bahkan tidak akan mengubah dan memperbaiki perekonomian mereka ataupun strata sosil. Justrus sebaliknya yang terjadi bagi mereka karena bisa saja

pasangan kandidat yang dipilih ialah orang-orang yang tidak melihat kebutuhan masyarakat karena memikirkan modal yang dikeluarkan pada saat kampanya.

1. Kurangnya Pengetahuan Masyrakat pada Politik

Jika tidak memahami sesuatu lalu dikerjakan pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak sesuai pula dengan yang seharusnya. Sama halnya dengan politik. Banyak masyarakat yang tidak memami politik itu seperti apa dan bagaimana bentuknya atau bahkan apa yang ditimbulkan politik itu sendiri. Sehingga pada saat terjadi pesta demokrasi tanpa berfikir siapa yang akan dipilih atau bersikap acuh tak acuh pada siapa yang akan terpilih. Dengan cara yang demikian para penjahat politik dengan mudah memperdayah masyarakat oleh karena ketidaktahuan mereka.

1. Kebudayaan

Berbicara tentang salah satu yang menyebabkan teijadinya politik uang, kemungkinan besar ada pengaruh dari kebudayaan itu sendiri. Mengapa penulis kemudian menempatkan kebudayaan sebagai suatu faktor penyebab? Karena penulis melihat bahwa kebanyakan orang melihat bahwa ketika ada yang memberi itu dilihat sebagai suatu rejeki dan alasannya rejeki jangan di tolak. Karena dilihat sebagai rejeki

maka apa yang diberikan diambil begitu saja dan mereka tanpa sadar mereka harus memberikan imbalan terhadap apa yang dianggap sebagai rejeki yang sudah diambilnya dan akan memilih pasangan kandidat yang katanya sudah memberi rejeki itu sebagai imbalan, atau bahkan menjadi tim sukses untuk memabntu menyalurkan politik uang kepada yang lain demi tercapainya pasangan kandidat yang sudah memberinya baik berupa uang maupun fasilitas.

1. Dampak Politik Uang

Kemudian dampak dari politik uang tentu ada dan itu tidak lepas dari bagaimana masyarakat memilih wakil rakyat. Jika masyarakat cerdas dalam memilih tentu akan membawa pengaruh yang baik tetapi jika sebaliknya maka dampak yang tidak baik pun akan muncul.

Karena disini membahas mengenai politik uang yang seharusnya tidak bisa karena bertentangan baik undang-undang yang berlaku di bangsa dann Negara ini maupun keagaamaan yang ada di Indonesia maka di sisni penulis berbicara mngenai dampak yang kurang baik yang timbul. Karena politik uang tidak akan membawa dampak yang baik bagi negeri ini karena justru kemerosotan politik yang akan terjadi seperti: kemiskinan kaena lapangan keija tidak terbuka, pembangunan terhambat, tejadinya korupsi dan lain sebagainya. [[20]](#footnote-21)

1. Uang dan Iman Kristen

Mungkin menjadi suatu pertanyaan dalam tulisan ini bahwa apa hubungan uang dengan Allah? Dan bagaiman pengaru uang itu sehingga penting untuk dibicarakan? Namun jelas bahwa jika berbicara tentang teologi atau Allah maka itu bukan hanya berbicara tentang eksistensi Allah itu sendiri tetapi juga menyangkut atau melibatkan seluru aspek kehidupan manusia. Memang uang bukanlah akar atau dasar dari segala kejahatan, tetapi cinta uang itulah yang menjadi akar dari segala kejahatan. Penting untuk membicarakan mengenai Uang dan Iman Kristen dalam tulisan ini, supaya bisa melihat bahamana semetinya menggunakan materi sebagai orang-orang yang bertuhan. Sekalipun uang dapat dijadikan tuhan, tetapi yang di maksudkan dalam hal ini ialah Tuhan yang kita pahami dalam iman Kristen.

1 Tim 6:9,10 “Tetapi mereka yang ingi kaya terjatuh kedalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.”

Dengan memahami ayat Alkitab di atas ada perbedaan di dalam mengenai uang dan penggunaanya. Uang bukanlah akar dari segala kejatan tetapi cinta uang itulah yang menjadi akar dari segala kejahatan. Namun perlu dilihat bagaimana pendapat para Ahli atau pengajar Kristen mengenai Cinta Uang. Mialanya Democritus mengatakan bahwa “Cinta Uang, merupakan kota besar (metropolis) bagi semua kejahatan, Seneca juga mengatakan bahwa

“keinginnan terhadap sesuatu yang bukan milik kita adalah beni dari segalah pikiran jahat”, Phocylides juga mengatakan bahwa “Cinta uang adalah ibu dari segalah kejahatan”, kemudian Philo mengatakan bahwa “ cinta uang yang merupakan asal muasal peanggaran hokum yang paling besar.” Sementara Athenaeus mengutip peribahasa bahwa “kesenangan perut adalh awal dan akar dari segalah kejahatan.”[[21]](#footnote-22)

Dari berbagai pengertian di atas mengenai “cinta uang” maka bisa dilihat secara jelas bahwa memang cinta uang akan menjadi penyebab dari berbagai kejahatan yang ada. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa uang bukan penyebab atau akar kejahatan tetapi “cinta uang” atau tamak uang itulah yang menjadi akar atau penyebab dari segala jenis kejahatan.[[22]](#footnote-23) Karena dengan uang sesorang dapat memuaskan keinginannya sendiri; dengan uang pula ia dapat membantu kebutuhan tetangga, dengan uang ia dapat melicinkan jalan bagi perbuatan yang salah. Dengan demikian dapat dilihat bahwa uang buaknlah sesuatu yang jahat tetapi perlu dipertanggungjawabkan karena di dalamnya ada bahaya. Dan bahaya apa yang ditimbulkan oleh uang itu sendiri. Bahayanya ialah sebagai berikut.

* Kekayaan merupakan sesuatu yang tidak akan perna memuaskan.
* Banyak orang merasa bahwa dengan kaya maka mereka akan aman, tetapi sebenarnya uang tidak dapat membeli segalanya.
* Keinginan akan kekayaan cenderung membuat seseorang bersifat egois
* Menambah kekuatiran dalam diri.
* Memperoleh kekayaan biasanya banyak orang yang tidak memperhatikan konsekuensinya sehingga menjadi suatu penyesalan.[[23]](#footnote-24) [[24]](#footnote-25)

Hal ini berarti bahwa kaya bukanlah sesuatu yang salah atau jahat. Namun yang ingin di lihat di sini ialah bahwa terkadang banyak orang yan ingin kaya tetapi dilakukan dengan cara yang tidak benar sehingga menjadi suatu nasihat bahwa jika terlalu ambisi untuk kaya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya ada banyak orang menyimpang dari jalan kebenaran dan menempuh jalan yang salah dalam mendapatkan uang.

Dalam tafsiran I Tim 6:9 di situ Paulus bukan semata-mata mengancam orang kaya melainkan mereka yang ingin kaya sehingga mereka memusatkan perhatian dan perjuangan mereka kepada kekayaan materi dan melupakan kekayaan lain. Orang-orang semacam itu mudah terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat Iblis, karena Iblis menawakarkan kekayaan itu mellui cara yang tidak halal (bdk Mat 4:9). Ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa- dalam bahasa aslinya: nafsu yang bodoh. Mereka tidak menginginkan hal-hal yang jauh lebih berharga. Yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan - merka membayar harga yang terlalu mahal untuk kekayaan itu, yaitu keselamatan jiwanya ( bdk Mat 16:26).

Di sini bisa dilihat bahwa untuk memperoleh kekayaan yang dilakukan secara tidak halal maka sebenarnya itu adalah tawaran Iblis, dan jika manusia lebih memilih tawaran itu maka sebenarnya manusia mengabaikan hal-hal yang sangat berharga dalam kehidupannya karena akan kehilangan keselamatn.

I Tim 6:10 (tafsiran) bahwa uang itu pada dirinya tidak mengandung dosa karena dengan uang orang dapat berbuat baik (bdk Luk 8:3; 16:9), tetapi

cinta uang adalah akar segalah kejahatan. Orang yang cinta akan uang bersedia melakukan berbagai kejahatan. Orang-orang semacam ini (yang memburu uang) menyimpang dari iman. Penyimpangan ini merupakan suatu proses. Lambat laun orang-orang ini kehilangan imannya, karena iman yang sejati hanya dapat dipelihara dalam hati nurani yang suci, dan jika hati nuraninya sucu maka hidup etisnya akan baik pula. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka — dalam bahasa aslinya: menusuk dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berbagai duka itu berwujud: penyesalan, kekecewaan, kehilangan ketentraman hati, pelbagai pengalaman yang menyedihkan sebagai akibat dari perbuatan dosanya.

Di sini bisa dipahami bahwa uang bukanlah sesuatu yang haram, tetapi jika orang terlalu mencintainya dan memburunya maka ini akan menjadi suatu ancaman yang bahaya. Mengapa? Karena dengan cinta uang segalah jenis kejahatan dapat dilakukakan dengan tidak semenah-menah sekalipun itu menyimpang dari kebenaran, karena jelas dikatakan di atas bahwa untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak halal maka itu tidak lain adalah tawaran Iblis. Di sini jika manusia terlalu mencintai uang maka secara otomatis akan menempuh jalan yang tidak benar atau menyimpang dari iman maka dengan demikian manusia lebih memilih kebinasaan dari pada kehidupan yang kekal melaui hidup etis yang baik dan benar.

1. Rudy Budiman. Ibid, Him 30
1. Ikatan Dosen Kewiraan Sulawesi, pendidikan Kewiraan, (Ujung Pandang, 1990, him 99 [↑](#footnote-ref-2)
2. Eka Darmaputra dalam buku Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia (Jakarta BPK Gunung Mulia) hal 22 [↑](#footnote-ref-3)
3. Saut Sirait, Ibid, him [↑](#footnote-ref-4)
4. Corrie van Dcr Ven, Antara O/oritariannisme dan demokrasi, dalam Jumal STT Intim Makassar “Gereja dan Politik”, Makassar, 2003, hal 22 [↑](#footnote-ref-5)
5. Corrie van Der Vea Ibid, him 100 [↑](#footnote-ref-6)
6. J1 Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lorens Bagus, Kamus Filsafat,, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) him 857 [↑](#footnote-ref-8)
8. Saut Sirait, Ibid, him 24 [↑](#footnote-ref-9)
9. E.G. Singgi, Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia/ Jakarta: Bpk.

Gunung Muliah ,2000) him 27 [↑](#footnote-ref-10)
10. Haryatmoko, Etika Politik dan kekuasaan, (Jakarta: Kompas,2003) him. 7 [↑](#footnote-ref-11)
11. Saut Sirait, Ibid, him.22-23 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid. him. 23 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid, him 37 [↑](#footnote-ref-14)
14. Haryantmoko, Ibid, him 3-5 [↑](#footnote-ref-15)
15. T.B. Simatupang, Kehadiran Kristen Dalam Perang, Refolusi dan pengenmabangan,

( Jakarta: BPK gunung Mulia, 1995), him. 7 [↑](#footnote-ref-16)
16. Pemahaman itu diambil dalam konsultasi pimpinan Gereja Toraja berskalaregional tentang gereja dan politik pada tanggal 19-22 Agustus 1998 di Tangmentoe. Hlm.4 [↑](#footnote-ref-17)
17. Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua 1994), him 965. [↑](#footnote-ref-18)
18. Akbar Kaclola, Kamus Istilah Politik Kontemporer, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009),

him 186. [↑](#footnote-ref-19)
19. Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Konsep, Teori dan Strategi) (Depok: RajaGrafindo Persada, Edisi keenam 2016), him 233. [↑](#footnote-ref-20)
20. Debat Ilmiah BEM STAKN TORAJA tentang Money Politik, (Aula STAKN Toraja). 23 September 2019 [↑](#footnote-ref-21)
21. William Barclay Ibid him 204-205 [↑](#footnote-ref-22)
22. Yap Wey Fong, dkk, Handbook To The Bible. (Bandung:Kalam Hidup 2015) him 702 [↑](#footnote-ref-23)
23. William Barclay, Ibid, him 205-207 [↑](#footnote-ref-24)
24. Rudy Budiman, tafsiran alkitab, surat-surat pastoral, I & II Timotius dan Tifus. (Jakarta: Bpk Gunung Mulia) him 61-62 [↑](#footnote-ref-25)